

PERAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAMPUNG HERITAGE PENELEH SURABAYA

oleh

Nadilla Nurul Yuniar¹, Ety Dwi Susanti²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

nadillayuniar7@gmail.com

Abstract

Community empowerment in community-based tourism management is a key factor for the sustainability of tourist destinations. This study aims to analyze the role of the Tourism Awareness Group (Pokdarwis) in community empowerment in Kampung Heritage Peneleh, Surabaya, and to identify the obstacles faced. The research employed a qualitative approach with informants selected purposively, including Pokdarwis members, local residents, and tourism managers. Data collection techniques included in-depth interviews, participatory observation, and documentation. Data analysis used the Miles and Huberman model, and data validity was ensured through source and method triangulation.

The findings indicate that Pokdarwis has implemented three stages of empowerment: awareness (through socialization, door-to-door visits, and GUSI/weekly clean-up activities), participation (community involvement remains situational and uneven), and efforts toward economic independence (the development of typical souvenirs is still in the planning stage and has not been realized). The obstacles faced are multidimensional, including limited sustainable funding, low and uneven community awareness and participation, time constraints and lack of commitment among Pokdarwis members due to the absence of incentives, and weak coordination with the sub-district office and relevant agencies. This study recommends strengthening self-funding mechanisms, increasing the intensity of community leader-based socialization, providing non-material incentives for active members, and strengthening regular institutional coordination.

Keywords: *Community empowerment; Pokdarwi; Kampung Heritage Peneleh; sustainable tourism; community participation*

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas menjadi faktor kunci keberlanjutan destinasi wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung Heritage Peneleh Surabaya serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan ditentukan secara purposive, meliputi anggota Pokdarwis, masyarakat setempat, dan pengelola wisata. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, serta keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pokdarwis telah melaksanakan tiga tahap pemberdayaan, yaitu penyadaran (melalui sosialisasi, kunjungan *door-to-door*, dan kegiatan GUSI/Minggu Bersih), partisipasi (masyarakat mulai terlibat namun masih bersifat situasional dan belum merata), serta upaya menuju kemandirian ekonomi (pengembangan souvenir khas masih pada tahap perencanaan dan belum terealisasi). Hambatan yang

dihadapi bersifat multidimensional, meliputi keterbatasan pendanaan berkelanjutan, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat yang belum merata, keterbatasan waktu serta komitmen anggota Pokdarwis karena tidak adanya insentif, dan lemahnya koordinasi dengan pihak kelurahan serta dinas terkait. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pendanaan mandiri, peningkatan intensitas sosialisasi berbasis tokoh masyarakat, pemberian insentif non-material bagi anggota aktif, serta penguatan koordinasi kelembagaan secara rutin.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat; Pokdarwis; Kampung Heritage Peneleh; pariwisata berkelanjutan; partisipasi Masyarakat

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor strategis yang memiliki kontribusi penting dalam mendorong pembangunan daerah, baik dari dimensi ekonomi, sosial, maupun budaya. Keberadaan sektor ini tidak hanya berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan membuka peluang kerja, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Dalam konteks pembangunan pariwisata berkelanjutan, masyarakat tidak dapat diposisikan hanya sebagai objek pembangunan, melainkan harus menjadi subjek utama yang terlibat aktif dalam proses pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata (Paramitha dkk., 2020). Oleh karena itu, keberhasilan suatu destinasi wisata sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat lokal diberdayakan dan dilibatkan dalam setiap proses pengembangan pariwisata.

Pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata menjadi aspek penting karena berkaitan dengan upaya meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki di lingkungannya. Melalui proses pemberdayaan, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya wisata yang dimiliki (Paramitha dkk., 2020). Dalam praktiknya, salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam

menggerakkan partisipasi masyarakat adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pokdarwis berfungsi sebagai wadah masyarakat dalam meningkatkan kesadaran wisata, mendorong partisipasi kolektif, serta memfasilitasi berbagai kegiatan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di tingkat lokal.

Kampung Heritage Peneleh Surabaya merupakan salah satu kawasan yang memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya. Kawasan ini menyimpan berbagai bangunan bersejarah serta nilai-nilai kearifan lokal yang masih dipertahankan oleh masyarakat setempat. Menurut Yatmaj (2019), keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan kawasan wisata menjadi sangat penting karena masyarakat merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan lingkungan wisata sekaligus memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan potensi tersebut. Namun demikian, upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui Pokdarwis di Kampung Heritage Peneleh masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata, belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi masyarakat, serta adanya kecenderungan penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata di kawasan ini masih menghadapi tantangan, baik dari

aspek internal organisasi maupun keterlibatan masyarakat secara luas.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas peran Pokdarwis dalam pemberdayaan masyarakat di kawasan wisata. Adirasputra (2018), misalnya, mengkaji peran Pokdarwis Tlatar Seneng dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Taman Tebing Breksi Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan Teori Fungsionalisme Struktural AGIL. Penelitian Muliani (2019) menyoroti peran Pokdarwis Berlian Bintaran dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Pasar Kebon Empring Bantul dengan fokus pada program penyadaran, pengembangan, dan pembinaan masyarakat. Selanjutnya, Dewi dkk. (2024) meneliti pengelolaan wisata berbasis Community Based Tourism pada Pokdarwis Kayutangan Heritage Malang dan menemukan bahwa kurang optimalnya pengelolaan dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya partisipasi masyarakat. Sementara itu, Kusumawati dan Nugroho (2020) lebih menitikberatkan pada peningkatan kapasitas pengelola Desa Wisata Gerbang Banyu Langit melalui pendekatan bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Adapun penelitian Nugroho dkk. (2025) mengenai Kampung Peneleh lebih berfokus pada pengembangan kualitas walking tour melalui pemetaan rute wisata dan desain media promosi, sehingga belum secara mendalam membahas proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pokdarwis.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, masih terdapat sejumlah kesenjangan penelitian (research gap) yang menunjukkan pentingnya penelitian ini dilakukan. Pertama, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji peran Pokdarwis dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung Heritage Peneleh Surabaya. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada pengembangan

teknis destinasi wisata maupun pelestarian fisik kawasan, sehingga aspek pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat belum memperoleh perhatian yang mendalam (Nugroho dkk., 2025). Kedua, meskipun beberapa penelitian telah mengidentifikasi berbagai hambatan seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan sumber daya manusia, kajian yang membahas secara spesifik bagaimana Pokdarwis yang baru terbentuk menghadapi dinamika internal organisasi, kepemimpinan, serta hubungan dengan para pemangku kepentingan dalam proses pemberdayaan masyarakat masih relatif terbatas. Ketiga, Pokdarwis Peneleh Heritage yang baru dibentuk pada tahun 2023 menjadikan kawasan ini sebagai kasus yang menarik untuk diteliti karena berada pada fase awal pembentukan organisasi. Kondisi ini memberikan peluang untuk memahami tantangan, proses adaptasi, serta strategi awal yang dilakukan oleh organisasi wisata berbasis masyarakat yang masih berkembang.

Dengan mempertimbangkan besarnya potensi wisata sejarah dan budaya yang dimiliki Kampung Heritage Peneleh serta masih adanya kesenjangan antara potensi wisata dengan realitas pemberdayaan masyarakat yang terjadi, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pokdarwis dalam proses pemberdayaan masyarakat di Kampung Heritage Peneleh Surabaya serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dinamika pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan pariwisata lokal yang lebih partisipatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung Heritage Peneleh, Surabaya, dengan lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*) berdasarkan pertimbangan potensi wisata sejarah dan budaya yang dimiliki kawasan tersebut. Informan penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata, meliputi anggota Pokdarwis, masyarakat setempat, serta pengelola wisata. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang komprehensif. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber (membandingkan informasi antar informan) dan triangulasi metode (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi).

PEMBAHASAN

3.1 Upaya Penyadaran Masyarakat dalam Kegiatan Wisata

Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kampung Heritage Peneleh Surabaya diawali dengan tahap penyadaran (*awareness*), yaitu membangun pemahaman masyarakat mengenai potensi wisata yang dimiliki lingkungannya. Tahap ini merupakan fondasi penting dalam proses pemberdayaan, karena tanpa kesadaran yang memadai, masyarakat cenderung pasif dan tidak terlibat secara aktif dalam pengelolaan pariwisata (Suharto, 2005). Pokdarwis Peneleh berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kawasan tempat tinggal mereka, yang kaya akan

bangunan bersejarah dan nilai kearifan lokal, memiliki nilai jual sebagai destinasi wisata heritage. Upaya ini sejalan dengan pendapat Paramitha dkk (2020) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata harus dimulai dari pengenalan potensi lokal agar masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan destinasi.

Bentuk konkret upaya penyadaran yang dilakukan Pokdarwis antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kunjung kampung (*door-to-door*), serta ajakan berpartisipasi dalam kegiatan sederhana seperti menjaga kebersihan lingkungan. Melalui sosialisasi, Pokdarwis menyampaikan informasi tentang potensi wisata Kampung Peneleh sekaligus mengajak masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan. Metode kunjung kampung dipilih karena pendekatan personal dinilai lebih efektif dalam membangun komunikasi dua arah dan mengatasi resistensi awal masyarakat terhadap perubahan (Mardikanto, 2014). Selain itu, ajakan untuk terlibat dalam kegiatan berskala kecil seperti kebersihan lingkungan bertujuan menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap kawasan wisata secara bertahap.

Salah satu bentuk konkret dari upaya penyadaran tersebut adalah kegiatan GUSI (Minggu Bersih) yang dilaksanakan secara rutin setiap dua minggu sekali. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas kebersihan lingkungan, tetapi juga sebagai sarana edukasi kolektif untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan sebagai daya tarik wisata. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan, "*biasanya Pokdarwis mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan*". Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendekatan langsung melalui aksi bersama dapat menumbuhkan kebiasaan positif secara bertahap. Menurut Ife (2008), pemberdayaan masyarakat yang efektif

sering kali dimulai dari tindakan praktis dan konkret yang melibatkan partisipasi langsung, karena melalui tindakan tersebut masyarakat belajar sambil melakukan (*learning by doing*).

Jika dikaitkan dengan konsep pemberdayaan masyarakat dari Edi Suharto, upaya Pokdarwis tersebut termasuk dalam tahap penyadaran (*awareness*), yaitu tahap awal yang bertujuan membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap potensi dan permasalahan yang ada di lingkungannya (Suharto, 2005). Pada tahap ini, masyarakat mulai dikenalkan pada pentingnya keterlibatan dalam kegiatan pembangunan, termasuk dalam pengelolaan pariwisata. Lebih lanjut, Suharto (2005) menjelaskan bahwa keberhasilan tahap penyadaran akan menentukan kelancaran tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap pengkapasitasan (*capacity building*) dan tahap pendayagunaan (*empowerment*). Dengan demikian, peran Pokdarwis sebagai fasilitator dalam tahap awal ini sangat strategis untuk membangun fondasi partisipasi masyarakat yang berkelanjutan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyadaran yang dilakukan belum sepenuhnya merata di seluruh lapisan masyarakat Kampung Peneleh. Masih terdapat sebagian warga yang belum memiliki kesadaran untuk terlibat dalam kegiatan pariwisata, baik karena faktor usia, tingkat pendidikan, maupun keterbatasan waktu karena kesibukan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dewi dkk (2024) pada Pokdarwis Kayutangan Heritage Malang, yang menemukan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh rendahnya pemahaman tentang manfaat ekonomi pariwisata serta kurangnya pendekatan yang berkelanjutan dari pengelola. Selain itu, Nugroho dkk (2025) juga mencatat bahwa Pokdarwis Peneleh Heritage yang baru dibentuk pada tahun 2023 masih menghadapi tantangan internal

seperti keterbatasan sumber daya manusia dan media promosi, yang secara tidak langsung mempengaruhi intensitas upaya penyadaran kepada masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penyadaran masih perlu dilakukan secara lebih intensif, berkelanjutan, dan dengan metode yang bervariasi agar dapat menjangkau seluruh segmen masyarakat. Beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan antara lain: (1) melibatkan tokoh masyarakat atau ketua RT/RW sebagai agen perubahan (*change agent*) untuk menyampaikan pesan-pesan penyadaran; (2) mengadakan kegiatan penyadaran dengan pendekatan budaya lokal yang lebih akrab dengan keseharian masyarakat; serta (3) menunjukkan *quick win* atau manfaat langsung yang dapat dirasakan masyarakat dari keterlibatan mereka, seperti peningkatan ekonomi dari berjualan atau menjadi pemandu wisata lokal (Mardikanto, 2014; Ife, 2008).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pokdarwis Kampung Heritage Peneleh telah melakukan upaya penyadaran masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, kunjung kampung, dan kegiatan gotong royong (GUSI). Namun demikian, upaya tersebut masih perlu diperkuat dari segi intensitas, jangkauan, dan variasi metode agar kesadaran masyarakat dapat terbentuk secara lebih luas dan merata. Penguatan pada tahap penyadaran ini menjadi sangat krusial karena akan menentukan keberhasilan tahap pemberdayaan selanjutnya, yaitu peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi wisata secara berkelanjutan (Suharto, 2005; Paramitha dkk, 2020).

3.2 Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pariwisata

Setelah tahap penyadaran, proses pemberdayaan masyarakat selanjutnya dapat diukur melalui tingkat partisipasi

masyarakat dalam kegiatan pariwisata. Partisipasi merupakan indikator kunci untuk menilai sejauh mana masyarakat tidak hanya memahami potensi yang ada, tetapi juga mulai terlibat secara langsung dalam pengelolaan pariwisata (Cohen & Uphoff, 1980). Dalam konteks pemberdayaan, partisipasi bukan sekadar kehadiran fisik, tetapi mencakup keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi dan pemanfaatan hasil (Oakley, 1991). Dengan demikian, tingkat partisipasi masyarakat Kampung Heritage Peneleh menunjukkan sejauh mana respon terhadap upaya penyadaran yang telah dilakukan sebelumnya oleh Pokdarwis. Paramitha dkk (2020) menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata sangat ditentukan oleh tingginya tingkat partisipasi aktif warga, karena partisipasi merupakan wujud nyata dari internalisasi nilai-nilai kesadaran yang telah dibangun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kampung Heritage Peneleh telah mulai berpartisipasi dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Pokdarwis, meskipun masih pada tahap awal dan bersifat terbatas. Salah satu bentuk partisipasi yang paling nyata terlihat dalam kegiatan GUSI (Minggu Bersih), di mana masyarakat turut serta menjaga kebersihan lingkungan secara rutin setiap dua minggu sekali. Kegiatan ini melibatkan interaksi langsung antarwarga dan menjadi bentuk partisipasi *pelaksanaan (implementation participation)*, yaitu masyarakat terlibat dalam kegiatan operasional tetapi belum pada tahap perencanaan atau pengambilan keputusan (Pretty, 1995). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Adirasputra (2018) di Taman Tebing Breksi, Yogyakarta, yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap awal pengembangan wisata cenderung dominan pada kegiatan fisik seperti kebersihan lingkungan, sementara

keterlibatan dalam aspek manajerial masih rendah.

Selain kegiatan GUSI, partisipasi masyarakat juga terlihat dalam dukungan terhadap kegiatan-kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Pokdarwis, seperti membantu pelaksanaan *walking tour* atau menciptakan suasana lingkungan wisata yang kondusif. Namun demikian, keterlibatan tersebut masih bersifat situasional dan belum menjadi kebiasaan yang konsisten di seluruh lapisan masyarakat. Hanya sebagian warga, khususnya yang tinggal di sekitar jalur wisata atau memiliki kedekatan emosional dengan pengurus Pokdarwis, yang cenderung lebih aktif. Sementara itu, warga yang tinggal agak jauh dari pusat kegiatan wisata atau memiliki kesibukan ekonomi tinggi cenderung pasif. Pola partisipasi yang tidak merata seperti ini juga ditemukan oleh Muliani (2019) di Desa Wisata Pasar Kebon Empring, Bantul, di mana partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor jarak tempat tinggal dari lokasi wisata serta persepsi terhadap manfaat ekonomi yang akan diperoleh.

Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan, "*biasanya masyarakat ikut kalau ada kegiatan, tapi tidak semuanya aktif*". Pernyataan ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat yang terbatas dan parsial, di mana hanya sebagian masyarakat yang terlibat secara aktif, sementara sebagian lain masih bersikap menunggu atau bahkan acuh tak acuh. Dalam tipologi partisipasi yang dikemukakan oleh Arnstein (1969), kondisi ini dapat kita masukkan dalam kategori *tokenism* (partisipasi simbolik), yaitu masyarakat dilibatkan tetapi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap proses pengambilan keputusan. Bahkan, dapat dikatakan mendekati tingkat *non-participation* jika masyarakat hanya dijadikan objek kegiatan tanpa ruang untuk menyuarakan aspirasi mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kesadaran mulai terbentuk, namun belum

sepenuhnya diikuti oleh keterlibatan yang merata dan bermakna.

Jika dikaitkan dengan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Edi Suharto (2005), kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pemberdayaan di Kampung Heritage Peneleh telah memasuki tahap partisipasi, yaitu tahap di mana masyarakat mulai dilibatkan dalam kegiatan pembangunan. Namun, Suharto (2005) menekankan bahwa tahap partisipasi yang ideal harus mencakup keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program. Sementara itu, temuan di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih terbatas pada pelaksanaan kegiatan (seperti gotong royong), belum mencapai tahap perencanaan dan evaluasi. Hal ini mengonfirmasi temuan Dewi dkk (2024) di Kayutangan Heritage Malang, bahwa ketidakefektifan pengelolaan wisata berbasis masyarakat disebabkan oleh masih rendahnya partisipasi warga dalam forum-forum perencanaan dan pengambilan keputusan.

Faktor yang seringkali menjadi penghambat partisipasi masyarakat yang teridentifikasi dalam penelitian ini antara lain: (1) keterbatasan waktu karena prioritas pada kegiatan ekonomi sehari-hari; (2) rendahnya persepsi tentang manfaat langsung dari keterlibatan dalam pariwisata; (3) kurangnya informasi dan sosialisasi yang menjangkau seluruh warga; serta (4) belum adanya insentif atau penghargaan bagi warga yang aktif berpartisipasi. Faktor-faktor ini sejalan dengan temuan Mardikanto (2014) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dipengaruhi oleh faktor internal (pengetahuan, sikap, motivasi) dan faktor eksternal (intensitas sosialisasi, dukungan fasilitator, serta insentif). Nugroho dkk (2025) juga mencatat bahwa Pokdarwis Peneleh Heritage yang masih muda usianya (berdiri 2023) belum optimal dalam menjalankan

fungsi edukasi dan fasilitasi secara berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan beberapa strategi peningkatan partisipasi yang lebih terencana, antara lain: (a) peningkatan frekuensi dan jangkauan sosialisasi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan RT/RW sebagai ujung tombak; (b) pengembangan program *quick win* yang memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga yang terlibat, seperti pelibatan warga sebagai pemandu wisata lokal, pengelola *homestay*, atau penjual cinderamata dan kuliner khas; (c) pembentukan sistem penghargaan (*reward system*) sederhana bagi warga yang aktif berpartisipasi, misalnya pemberian plakat atau pengakuan publik; serta (d) penguatan kapasitas Pokdarwis itu sendiri melalui pelatihan manajemen partisipasi dan komunikasi publik (Ife, 2008; Suharto, 2005).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata di Kampung Heritage Peneleh telah mulai terbentuk, namun belum berjalan secara optimal. Partisipasi yang ada masih bersifat simbolik, situasional, dan didominasi oleh sebagian masyarakat saja, belum merata di seluruh lapisan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan yang lebih sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat, agar proses pemberdayaan dapat berkembang ke tahap berikutnya, yaitu tahap peningkatan kapasitas (*capacity building*) dan tahap kemandirian (*independence*). Tanpa peningkatan partisipasi yang signifikan, risiko kegagalan pemberdayaan dan ketidakberlanjutan pengelolaan wisata akan semakin besar (Suharto, 2005; Paramitha dkk, 2020).

3.3 Kemandirian Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata

Tahap lanjutan proses pemberdayaan masyarakat adalah kemandirian

(*independence*), yaitu kondisi di mana masyarakat tidak hanya terlibat dalam kegiatan, tetapi juga mampu mengelola serta memanfaatkan potensi yang dimiliki secara mandiri, khususnya dalam aspek ekonomi. Suharto (2005) menegaskan bahwa kemandirian merupakan tujuan akhir dari pemberdayaan, di mana masyarakat memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan secara otonom, mengakses sumber daya, serta mengelola kegiatan ekonomi tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pihak eksternal. Dalam konteks pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*), kemandirian dapat diukur dari kemampuan masyarakat dalam menciptakan peluang usaha, mengembangkan produk lokal (seperti souvenir, kuliner, atau jasa wisata), serta mengelola pendapatan yang dihasilkan secara kolektif dan berkelanjutan (Paramitha dkk, 2020; Mardikanto, 2014). Kemandirian juga mencakup aspek psikologis, yaitu rasa percaya diri dan kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalahnya sendiri tanpa selalu bergantung pada bantuan dari luar (Ife, 2008).

Berdasarkan hasil penelitian, upaya menuju kemandirian masyarakat di Kampung Heritage Peneleh masih belum sepenuhnya terwujud. Pokdarwis telah berupaya mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal, salah satunya melalui himbauan untuk membuat produk *souvenir* khas Kampung Peneleh, seperti gantungan kunci dengan miniatur bangunan bersejarah, batik motif Peneleh, atau kuliner khas setempat. Namun, hingga saat ini, upaya tersebut masih belum terealisasi secara optimal dan masih berada pada tahap perencanaan serta dorongan awal kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan di Kampung Peneleh masih berada pada tahap transisi dari partisipasi menuju kemandirian, namun belum mencapai titik *take off* di mana masyarakat

mulai secara aktif memproduksi dan memasarkan produk wisata secara mandiri. Hal serupa juga ditemukan oleh Muliani (2019) di Desa Wisata Pasar Kebon Empring, Bantul, di mana pengembangan produk ekonomi lokal terhambat oleh kurangnya keterampilan teknis masyarakat dalam desain produk dan strategi pemasaran.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi belum tercapainya kemandirian dalam masyarakat adalah keterbatasan dalam aspek pendanaan dan permodalan. Kegiatan yang dijalankan oleh Pokdarwis Peneleh sebagian besar masih bergantung pada inisiatif internal (swadaya anggota) serta dukungan eksternal yang terbatas, baik dari pemerintah kecamatan/kelurahan maupun dari sektor swasta. Tanpa adanya akses permodalan yang memadai, masyarakat sulit untuk memulai usaha produktif seperti produksi souvenir dalam skala kecil, apalagi untuk pemasaran yang lebih luas (Mardikanto, 2014). Nugroho dkk (2025) dalam penelitiannya di Kampung Peneleh juga mengidentifikasi bahwa Pokdarwis yang masih baru (berdiri 2023) belum memiliki anggaran operasional yang memadai, sehingga ruang gerak dalam mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat menjadi kurang optimal. Selain pendanaan, keterbatasan lain yang teridentifikasi adalah minimnya keterampilan teknis (seperti desain produk, pengemasan, digital marketing) dan lemahnya jejaring pemasaran. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dewi dkk (2024) di Kayutangan Heritage Malang, yang menyebutkan bahwa kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terlatih menjadi penghambat utama dalam pengembangan produk ekonomi kreatif berbasis wisata.

Jika dikaitkan dengan konsep pemberdayaan dari Suharto (2005), kondisi di Kampung Peneleh menunjukkan bahwa proses pemberdayaan belum mencapai tahap *pendayagunaan (utilization)*, yaitu

tahap di mana masyarakat mampu menggunakan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Tahap pendayagunaan mensyaratkan masyarakat telah memiliki akses terhadap: (1) modal usaha; (2) keterampilan teknis dan manajerial; (3) jaringan pemasaran; serta (4) kelembagaan ekonomi yang berfungsi baik (seperti koperasi atau badan usaha milik desa). Sementara itu, di Kampung Peneleh, keempat akses tersebut masih sangat terbatas. Lebih lanjut, Pretty (1995) dalam hal ini membedakan partisipasi fungsional (masyarakat dilibatkan untuk mencapai tujuan proyek) dengan partisipasi pemberdayaan (masyarakat memiliki inisiatif dan kontrol penuh). Partisipasi masyarakat Peneleh saat ini masih berada pada level fungsional, belum mencapai level pemberdayaan yang ditandai dengan adanya inisiatif mandiri dan kontrol atas sumber daya.

Perbandingan dengan penelitian lain memperkuat temuan ini. Adirasputra (2018) di Taman Tebing Breksi, Yogyakarta, menemukan bahwa kemandirian ekonomi masyarakat berbasis wisata memerlukan waktu minimal 2-3 tahun sejak Pokdarwis dibentuk, dengan pendampingan yang intensif dari perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat. Sementara itu, Pokdarwis Peneleh Heritage baru berdiri pada tahun 2023 (Nugroho dkk, 2025), sehingga secara realistis belum cukup matang untuk mencapai kemandirian penuh. Namun demikian, perbandingan dengan keberhasilan Kampung Wisata Peneleh di Kota Batu (Hasan dkk, 2021) menunjukkan bahwa keterlibatan aktif Pemerintah Daerah dalam menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses pasar sangat menentukan kecepatan pencapaian kemandirian masyarakat. Di Kampung Peneleh Surabaya, dukungan tersebut masih perlu ditingkatkan intensitasnya.

Berdasarkan identifikasi faktor penghambat dan pembelajaran dari kasus sukses lainnya, beberapa rekomendasi

strategis yang dapat dilakukan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Kampung Heritage Peneleh adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses permodalan melalui pembentukan koperasi simpan pinjam atau kerja sama dengan lembaga keuangan mikro dan CSR perusahaan.
2. Pelatihan keterampilan kewirausahaan yang berkelanjutan, meliputi desain produk souvenir, pengemasan (*packaging*) yang menarik, serta pemasaran digital (media sosial, *marketplace*).
3. Penguatan kelembagaan ekonomi Pokdarwis dengan membentuk unit usaha produktif yang dikelola secara transparan dan profesional.
4. Pendampingan dari perguruan tinggi atau dinas terkait (seperti Disbudpar Surabaya, Dinas Koperasi dan UKM) dalam bentuk program kemitraan jangka panjang.
5. Pengembangan *linkage* dengan mitra seperti hotel, agen perjalanan, dan platform wisata daring untuk memasarkan produk-produk lokal (Ife, 2008; Mardikanto, 2014; Suharto, 2005; Hasan dkk, 2021).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pokdarwis di Kampung Heritage Peneleh belum mencapai tahap kemandirian, khususnya dalam aspek ekonomi. Upaya yang ada masih berada pada tahap perencanaan dan dorongan awal, sementara realisasi produk ekonomi unggulan (seperti souvenir) belum terwujud. Faktor utama penghambat adalah keterbatasan pendanaan, keterampilan, dan jejaring pemasaran, serta usia Pokdarwis yang masih relatif muda. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif, terstruktur, dan berkelanjutan, tidak hanya dari Pokdarwis tetapi juga dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, dalam

mendorong masyarakat agar mampu mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki. Tanpa intervensi yang tepat, pemberdayaan berisiko berhenti pada tahap partisipasi simbolik dan tidak pernah mencapai kemandirian yang menjadi tujuan akhir dari pemberdayaan itu sendiri (Suharto, 2005; Paramitha dkk., 2020).

3.4 Hambatan Pemberdayaan Masyarakat oleh Pokdarwis

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kampung Heritage Peneleh, Pokdarwis menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas dan keberlanjutan program yang dijalankan. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa proses pemberdayaan belum sepenuhnya mampu mencapai tahap kemandirian masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Suharto (2005). Selain persoalan ekonomi seperti keterbatasan modal dan keterampilan, hambatan yang muncul juga berkaitan dengan aspek kelembagaan, sosial, dan struktural. Menurut Mardikanto (2014), keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan kelembagaan lokal dalam mengatasi kendala internal maupun eksternal organisasi.

Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan pendanaan. Sebagian besar kegiatan Pokdarwis masih mengandalkan swadaya anggota sehingga ruang gerak organisasi menjadi terbatas. Meskipun terdapat dukungan eksternal, seperti bantuan fasilitas dari Bank Indonesia dan pembinaan dari Disbudpar Surabaya, dukungan tersebut belum bersifat berkelanjutan, terutama untuk kebutuhan operasional harian (Nugroho dkk., 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan terhadap bantuan berbasis proyek (*project-based dependency*), di mana bantuan lebih bersifat sementara daripada pendanaan jangka panjang (Ife, 2008). Padahal, keberlanjutan pemberdayaan membutuhkan sistem

pendanaan mandiri, misalnya melalui retribusi wisata, partisipasi anggota, atau pengelolaan usaha bersama (Paramitha dkk., 2020).

Hambatan berikutnya adalah rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Sebagian warga masih belum memahami bahwa Kampung Peneleh memiliki potensi wisata yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Faktor usia, tingkat pendidikan, serta minimnya interaksi dengan Pokdarwis turut memengaruhi kondisi tersebut (Mardikanto, 2014). Temuan ini sejalan dengan penelitian Dewi dkk. (2024) di Kayutangan Heritage Malang yang menunjukkan bahwa masyarakat cenderung kurang terlibat apabila merasa tidak memperoleh manfaat langsung dari kegiatan pariwisata. Di Kampung Peneleh, warga yang tinggal jauh dari titik utama wisata juga menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih rendah.

Selain itu, keterbatasan waktu dan komitmen anggota Pokdarwis menjadi tantangan tersendiri. Sebagian besar anggota memiliki pekerjaan utama di luar organisasi, sehingga kegiatan Pokdarwis sering dilakukan secara fleksibel dan belum berjalan konsisten. Kondisi ini diperkuat dengan tidak adanya insentif finansial bagi anggota, yang menyebabkan motivasi dan keterlibatan cenderung fluktuatif (Mardikanto, 2014). Dalam perspektif *resource mobilization theory*, partisipasi sukarela memerlukan adanya insentif, baik material maupun non-material, untuk menjaga komitmen anggota (Jenkins, 1983). Namun, di Kampung Peneleh, bentuk apresiasi sosial maupun penghargaan bagi anggota aktif belum dikelola secara sistematis.

Hambatan lainnya berasal dari lemahnya koordinasi dan dukungan kelembagaan. Hubungan antara Pokdarwis dengan pemerintah kelurahan maupun kecamatan masih bersifat insidental dan belum terbangun dalam bentuk kerja sama

yang terstruktur. Padahal, pemerintah lokal memiliki peran penting dalam membuka akses terhadap pelatihan, permodalan, dan jaringan pemasaran wisata (Paramitha dkk., 2020). Nugroho dkk. (2025) juga mencatat bahwa dukungan Disbudpar Surabaya lebih banyak berupa pembinaan teknis dibandingkan dukungan pendanaan langsung. Akibatnya, Pokdarwis masih harus mencari sumber daya secara mandiri untuk menjalankan berbagai program pemberdayaan.

Jika dianalisis menggunakan konsep pemberdayaan Suharto (2005), hambatan di Kampung Heritage Peneleh terjadi pada tiga level sekaligus, yaitu level mikro berupa rendahnya kesadaran dan motivasi masyarakat, level mezzo berupa lemahnya kapasitas organisasi dan jaringan sosial, serta level makro berupa terbatasnya dukungan kebijakan dan akses sumber daya. Karena itu, proses pemberdayaan membutuhkan sinergi antara masyarakat, Pokdarwis, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta agar dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan (Ife, 2008; Mardikanto, 2014).

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, beberapa strategi dapat dilakukan, antara lain mengembangkan mekanisme pendanaan mandiri melalui retribusi wisata atau kerja sama CSR, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh lokal dan media sosial, memberikan penghargaan non-material kepada anggota aktif, memperkuat forum koordinasi antar pemangku kepentingan, serta menyelenggarakan pelatihan manajemen organisasi bagi pengurus Pokdarwis (Suharto, 2005; Mardikanto, 2014; Ife, 2008; Nugroho dkk., 2025).

Dengan demikian, hambatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Heritage Peneleh bersifat multidimensional dan saling berkaitan, mulai dari keterbatasan pendanaan, rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya komitmen anggota, hingga

belum optimalnya dukungan kelembagaan. Oleh sebab itu, keberhasilan pemberdayaan tidak dapat hanya dibebankan kepada Pokdarwis semata, tetapi memerlukan kolaborasi dan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak agar tujuan kemandirian masyarakat dapat tercapai.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung Heritage Peneleh Surabaya telah dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu penyadaran, partisipasi, dan upaya menuju kemandirian. Pada tahap penyadaran, Pokdarwis telah melakukan sosialisasi, kunjungan door-to-door, serta kegiatan GUSI (Minggu Bersih) untuk membangun pemahaman masyarakat tentang potensi wisata, namun upaya ini belum merata di seluruh lapisan masyarakat karena masih banyak warga yang belum tersentuh informasi secara maksimal. Pada tahap partisipasi, masyarakat mulai terlibat dalam kegiatan gotong royong dan mendukung operasional wisata, tetapi keterlibatan tersebut masih bersifat situasional dan hanya dilakukan oleh sebagian warga, sementara yang lain cenderung pasif. Pada tahap kemandirian ekonomi, upaya pengembangan produk lokal seperti souvenir khas Kampung Peneleh masih berada pada tahap perencanaan dan belum terealisasi secara nyata karena masyarakat belum memiliki kemampuan serta dukungan yang cukup untuk memulai usaha.

Hambatan utama yang dihadapi Pokdarwis meliputi tiga hal. Pertama, keterbatasan pendanaan yang membuat sebagian besar kegiatan bergantung pada inisiatif internal tanpa dukungan berkelanjutan dari pihak eksternal. Kedua, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat yang belum merata, terutama pada warga yang tinggal agak jauh dari pusat kegiatan wisata. Ketiga, keterbatasan

waktu dan komitmen anggota Pokdarwis karena kesibukan masing-masing serta tidak adanya insentif yang diberikan. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan sumber pendanaan mandiri seperti retribusi wisata atau kerja sama dengan dunia usaha, peningkatan sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan ketua RT/RW agar menjangkau seluruh warga, pemberian penghargaan atau insentif non-material bagi anggota Pokdarwis yang aktif, serta penguatan koordinasi rutin antara Pokdarwis, kelurahan, dan dinas pariwisata setempat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan proses pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Adirasputra, A. (2018). *Peran Kelompok Sadar Wisata Tlatar Seneng dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Studi kasus pada objek wisata Taman Tebing Breksi di Dusun Nglengkong Sambirejo Prambanan Sleman Yogyakarta)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213-235.
- Dewi, L. N., Khoiron, & Abidin, A. Z. (2024). Manajemen wisata berbasis community based tourism (Studi kasus pengorganisasian Pokdarwis Kayutangan Heritage Kota Malang Jawa Timur). *Jurnal Respon Publik*, 18(7), 30-42.
- Hasan, M., dkk. (2021). Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kampung wisata. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 45-58.
- Ife, J. (2008). *Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jenkins, J. C. (1983). Resource mobilization theory and the study of social movements. *Annual Review of Sociology*, 9(1), 527-553.
- Mardikanto, T. (2014). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Muliani, R. F. (2019). *Peran Kelompok Sadar Wisata dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Pasar Kebon Empring Dusun Bintaran Wetan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nugroho, S., Rizqiyah, F., Sulistyandari, U., Soemardiono, B., Kharismawan, R., Mahendra, A. S., Ramadhani, I. D. B., & Audina, S. Z. (2025). Peningkatan kualitas walking tour Kampung Sejarah Peneleh sebagai bagian pariwisata berkelanjutan. *Sewagati*, 9(2), 366-375.
- Oakley, P. (1991). *Projects with people: The practice of participation in rural development*. Geneva: International Labour Office (ILO).
- Paramitha, O. D., Kagungan, D., & Mulyana, N. (2020). Strategi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tanggamus. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2(2), 75-86.
- Pretty, J. N. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247-1263.
- Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Yatmaj. (2019, Oktober 28). Peneleh Heritage Tour dimulai bulan depan. *Jawa Pos*. Diakses dari <https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01242244/peneleh-heritage-tour-dimulai-bulan-depan>